

---

**ARTIKEL PENELITIAN**

**ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**Abdullah<sup>✉</sup>, Januardi M. Diah, Charlyna S. Purba**

Politeknik Negeri Pontianak

**Abstrak**

---

Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut mencapai kinerja optimal menjalankan fungsi koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Serawak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangka dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengutamakan data primer melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kompetensi dan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak empat responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik. Hasil uji statistik diperoleh nilai  $p=0,043$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kompetensi dengan kinerja di BPPD Provinsi Kalimantan Barat.

---

**Kata Kunci:** Kompetensi, Kinerja, Pengaruh

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: [abdul\\_polnep2@yahoo.co.id](mailto:abdul_polnep2@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

Setiap proses penyelenggaraan dalam negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatur tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Hal ini menjadi awal kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden ini menyatakan “Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah”. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat-Serawak Malaysia Timur. Wilayah perbatasan di Indonesia identik sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi (Soni Sudiar, 2015:490).

Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi terbesar ke empat di Indonesia dengan luas sekitar 146.807 km<sup>2</sup> (7,53% dari luas Indonesia) atau 1,13 kali Pulau Jawa. Dikutip dari website resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (<http://kalbarprov.go.id/>) pada 9 Maret 2019 pukul 12:07 WIB. diketahui bahwa terdapat 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten

Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabu Raya, Kabupaten Kayong Utara. Pada umumnya, masyarakat Provinsi Kalimantan Barat lebih memilih tinggal di daerah dibandingkan perkotaan (Kota Pontianak).

Panjang wilayah perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat - Serawak Malaysia Timur ±966 kilometer. Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat - Serawak Malaysia Timur meliputi 5 (lima) wilayah kabupaten, 15 kecamatan, 98 desa dengan luas ±20.352 kilometer persegi dan kepadatan rata-rata 8 orang/kilometer persegi, diantaranya (<http://kalbarprov.go.id/>) pada 9 Maret 2019 pukul 12:07 WIB: a) Kabupten Sambas: Kecamatan Paloh, Sajingan Besar; b) Kabupaten Bengkayang: Kecamatan Jagoi Babang, Siding; c) Kabupaten Sanggau: Kecamatan Entikong, Sekayam; d) Kabupaten Sintang: Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah; dan e) Kabupaten Kapuas Hulu: Kecamatan Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin.

Terdapat 50 jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Provinsi Kalimantan Barart dengan 32 kampung di Serawak. Dari jumlah jalan setapak tersebut, telah disepakati 16 desa di Provinsi Kalimantan Barat dan 10 kampung di Serawak sebagai Pos Lintas Batas.

Corak ketertinggalan wilayah perbatasan dapat dilihat dari berbagai macam segi, antara lain: infrastruktur dasar yang tersedia masih minim, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kurang baiknya kualitas

pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sementara karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju ke daerah perbatasan.

Guna mendukung optimalnya kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kompetensi aparatur di dalam institusi tersebut menjadi perhatian penting. Analisa kinerja birokrasi sampai saat ini menjadi sangat penting karena memiliki nilai yang sangat strategis. Pengukuran kinerja aparatus dapat diterjemahkan dalam suatu kegiatan evaluasi yang menilai atau melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Di sisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan institusi menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program suatu instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat adalah lembaga yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Metode korelasional digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai pada kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 31 orang.

Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui pemberian kuesioner oleh 31 orang pegawai Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat yang berisikan pertanyaan berupa pernyataan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja diantaranya:

1. motif, adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat, adalah karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi
3. konsep diri, adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang, percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri setiap orang.
4. pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi kompleks, skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.
5. keterampilan, adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu, kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berfikir analitis dan konseptual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan bahwa 64,5% pegawai laki-laki, 41,9% pegawai

berpendidikan S-1, 67,7% pegawai mempunyai kompetensi rendah dan 80,6% pegawai mempunyai kinerja cukup baik.

Tabel 1. Analisis Univariat

| Variabel      | Kategori      | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|--------|------------|
| Jenis Kelamin | Laki-laki     | 20     | 64,5       |
|               | Perempuan     | 11     | 35,5       |
| Pendidikan    | SMA/Sederajat | 12     | 38,7       |
|               | D-III         | 1      | 3,2        |
|               | D-IV/S-1      | 13     | 41,9       |
|               | S-2           | 5      | 16,1       |
| Kompetensi    | Rendah        | 21     | 67,7       |
|               | Tinggi        | 10     | 32,3       |
| Kinerja       | Buruk         | 3      | 9,7        |
|               | Cukup Baik    | 25     | 80,6       |
|               | Baik          | 3      | 9,7        |

Tabel 2. Analisis Bivariat

| Tingkat Kompetensi | Tingkat Kinerja |      |    |      | Nilai p |
|--------------------|-----------------|------|----|------|---------|
|                    | n               | %    | n  | %    |         |
| Rendah             | 4               | 1,9  | 0  | 0    | 0,043   |
| Tinggi             | 11              | 40,7 | 16 | 59,3 |         |

Dari hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak 4 responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik. Hasil uji statistik diperoleh nilai  $p=0,043$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kompetensi dengan kinerja di BPPD Provinsi Kalimantan Barat.

## PENUTUP

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 21 orang pegawai memiliki kompetensi rendah pada angka 67,7%, dan 10 orang pegawai memiliki kompetensi tinggi pada angka 32,2%. Dari hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak 4 responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Namira Mardin. *Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi. Lulusan Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015.
- Baderan, Umar Sako dan Yespin Ingo, *Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Administrasi*

*di Kantor Kecamatan Boliyuhoto Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018.

- Lukman, Marcus. *Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional*, Jurnal Perspektif Volume XI Nomor 2 Tahun 2006 Edisi April.

- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, *Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat*, <http://kalbarprov.go.id/>.
- Rande, Dina. *Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 2 Februari 2016.
- Soetrisno, Annisa Putri dan Alini Gilang, *Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan (Studi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Wifel Bandung)*, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Volume VIII Nomor 1 April 2018.
- Sudiar, Sonny. *Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Administraive Reform, Volume 3 Nomor 4 Oktober – Desember 2015.
- Warassih, Esmi. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*. Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.